

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KENDAL

# 2019



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT **2019**

## Kabupaten Kendal

---

---

ISBN :  
Katalog : 4102004.3324  
No. Publikasi : 3324550.1904  
Ukuran Buku : 18,2 cm X 25,7 cm  
Jumlah Halaman : xii + 73 halaman

Naskah:  
Seksi Nerwilis

Penyunting, Layout:  
Seksi Nerwilis

Gambar Kulit:  
Seksi Nerwilis

Diterbitkan oleh:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Dicetak Oleh:  
CV. Mitra Jaya Mandiri

Tahun Cetak:  
2019

# TIM PENYUSUN



## **Pengarah**

Dra. Ummi Hastuti, M.Si

## **Penanggung Jawab**

Irma Nur Afifah, SST, M.Si

## **Penyunting**

Irma Nur Afifah, SST, M.Si

## **Penulis**

1. Indriyati, SST, M.Si.
2. Siska Oktaviana Dwi Anggraeni, SST



# Kata Pengantar



**P**ublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kendal 2019 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Istilah kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan tidak semuanya dapat diukur. Data yang digunakan bersumber dari data primer hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), yang meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Kerja Nasional, serta data dari instansi lain di luar BPS.

Publikasi ini menyajikan statistik dan indikator kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Statistik yang dicakup antara lain meliputi aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, serta sosial lainnya. Dengan demikian, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kendal 2019 diharapkan mampu menjembatani antara penyedia dan pengguna data.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berperan dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih yang sebesar - besarnya. Saran untuk perbaikan publikasi sangat diharapkan demi penyajian yang lebih baik di masa mendatang.

Kendal, Desember 2019  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Kendal

Dra. Ummi Hastuti, M.Si  
NIP. 19640813 199003 1 002



# Daftar Isi

Katalog	.....	i
Tim Penyusun	.....	iii
Kata Pengantar	.....	v
Daftar Isi	.....	vii
Daftar Tabel	.....	ix
Daftar Gambar	.....	xi



<b>Bab 1</b>		
Kependudukan		13
<b>Bab 2</b>		
Kesehatan dan Gizi		27
<b>Bab 3</b>		
Pendidikan		37
<b>Bab 4</b>		
Ketenagakerjaan		49

	<b>Bab 5</b>	
59	Tarif dan Pola Konsumsi	
	<b>Bab 6</b>	
65	Perumahan	
	<b>Bab 7</b>	
71	Kemiskinan	
81	Kesimpulan	
85	Daftar Pustaka	







# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kendal, 2015-2019 .....	17
Tabel 1.2	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2015-2019 .....	19
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Kendal, 2015-2019 .....	21
Tabel 1.4	Persentase Perempuan Berstatus Pernah Kawin dan Berumur 15-49 Tahun menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2017-2018 ....	23
Tabel 1.5	Persentase Perempuan Berstatus Pernah Kawin dan Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2018 .....	23
Tabel 1.6	Akseptor KB Aktif di Kabupaten Kendal, 2016-2018 .....	24
Tabel 2.1	Angka Kesakitan menurut Karakteristik Penduduk Tahun 2017-2018 .....	31
Tabel 2.2	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kendal, 2018 .....	32
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin, 2017-2018 .....	33
Tabel 2.4	Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang pernah mendapat Imunisasi menurut Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi, 2017 .....	34
Tabel 3.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal, 2017-2018 .....	43
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal, 2017-2018 .....	44
Tabel 3.4	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Kendal, 2017-2018 .....	45
Tabel 3.5	Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah di Kabupaten Kendal, 2015/2016-2018/2019 .....	46
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal, 2017-2018 (%) .....	52
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Sektor di Kendal, 2017 – 2018 .....	55



# Daftar Tabel

Tabel 4.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kendal, 2017– 2018 .....	56
Tabel 5.1	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018.....	62
Tabel 5.2	Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Kendal Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Tahun 2014 – 2018 .....	63
Tabel 5.3	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Perhari Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018 .....	64
Tabel 6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Kendal Tahun 2017 – 2018 .....	68
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018 (Persentase) .....	69
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018 (Persentase) .....	70
Tabel 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal Tahun 2015-2018 (Persentase) .....	73
Tabel 7.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kendal, Tahun 2015-2018 .....	74
Tabel 7.3	Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin Kabupaten Kendal, 2015 – 2018 .....	76
Tabel 7.4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Kabupaten Kendal, 2015 – 2018 (Persentase) .....	77



# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Rata-Rata Pertumbuhan Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Kendal, 2015-2019 (persen) .....	20
Gambar 3.1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal (tahun), 2012-2018 .....	41
Gambar 4.1	Pengangguran di Kendal Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018 (persen) .....	53
Gambar 7.1	Karakteristik Perumahan pada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kendal, 2015-2018 (Persentase) .....	78

<https://kendalkab.bps.go.id>







# **BAB 1 KEPENDUDUKAN**

<http://kemdikbud.go.id>



Indonesia menempati urutan terbesar keempat di dunia dalam jumlah populasi penduduknya setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Terlebih lagi, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa, salah satunya di Kabupaten Kendal. Problem mengenai jumlah penduduk yang tinggi sudah bukan lagi isu baru dalam diskusi dan penelitian. Salah satu pandangan tentang pertumbuhan populasi dikemukakan oleh seorang ekonom berkebangsaan Inggris, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dalam karyanya yang berjudul *'The Essay on the Principle of Population'*. Lahirnya karya Malthus tersebut sebenarnya didasari oleh kritikan Malthus terhadap konsep 'masyarakat ideal' (*perfect society*) yang diperkenalkan oleh William Godwin dan beberapa penulis lain. Ia menganggap bahwa kondisi masyarakat yang ideal tidak akan mampu terwujud karena adanya keterbatasan-keterbatasan.

William Godwin (1756-1836) dalam bukunya *"Political Justice"* (1793) menyatakan bahwa ketika dunia mencapai fase dimana tidak ada lagi peperangan dan permusuhan, serta saat pengetahuan tentang pertanian dan perindustrian mulai berkembang pesat, maka pada saat itu akan tercapai kondisi ideal dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, *"Political Justice"* merupakan visi Godwin tentang masa depan manusia, dimana perkembangan moral dan intelektual manusia akan mampu meningkatkan harkat kehidupan. Godwin mengemukakan bahwa manusia dibentuk oleh lingkungan dan pendidikan. Oleh karenanya, dengan meningkatkan kualitas lingkungan dan pendidikan, maka meningkat pula kualitas hidup manusia.

Dalam *'The Essay on the Principle of Population'*, Malthus meragukan gagasan Godwin tersebut. Menurut pandangannya, Malthus menyebutkan dua prinsip dasar. Pertama, sumberdaya pangan merupakan suatu keharusan bagi manusia untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Kedua, hubungan antar individu laki-laki dan perempuan akan selalu ada, sebagai salah satu upaya manusia untuk melanjutkan keturunan. Pernyataan tersebut terkenal dengan istilah "the Malthusian Trap", bahwa pertumbuhan populasi penduduk akan selalu

mengikuti deret ukur, atau dengan kata lain bergerak cepat. Sementara pertumbuhan sumberdaya pangan dan produksi yang tersedia untuk dikonsumsi selalu mengikuti deret hitung, atau bergerak dengan lambat.

Lebih lanjut, Malthus menegaskan bahwa ketika pertumbuhan populasi penduduk tidak terkendali, sementara ketersediaan pangan tidak mampu mengimbangi jumlah populasi yang ada, maka terbentuknya tatanan kehidupan

*Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta distribusi penduduk yang tidak merata menjadi masalah serius yang harus dihadapi*

masyarakat ideal seperti yang dicita-citakan Godwin tidak akan pernah terwujud, alias hanya menjadi sebuah utopia. Oleh karenanya, perlu dilakukan pembatasan pertumbuhan populasi supaya stabilitas pangan dapat terjaga.

Menurut Malthus, ada dua faktor yang dapat menghambat pertumbuhan populasi, yakni *positive checks* dan *preventive checks*. Pertama, peningkatan angka kematian, misal terjadi peperangan, bencana kelaparan, serta timbulnya wabah penyakit (*positive checks*). Kedua, berupa penundaan usia perkawinan serta pemanfaatan alat kontrasepsi (*preventive checks*).

Lebih lanjut, urgensi dari pengendalian jumlah penduduk ini dilakukan untuk mengimbangi pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang layak. Karena jika kebutuhan hidup dasar tersebut tidak mampu terpenuhi, akan timbul berbagai masalah yang mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak cukup akan menimbulkan kelaparan, meningkatkan angka gizi buruk balita hingga sampai pada peningkatan jumlah kematian penduduk. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk akan berimbas pada kurangnya ketersediaan pemukiman yang pada akhirnya dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh, dan tidak layak. Masalah lain yang dapat timbul di antaranya terjadinya peningkatan kriminalitas dan gangguan keamanan, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai serta rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Masalah kependudukan merupakan salah satu aspek penting dan perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Selain tingkat pertumbuhan penduduk (sisi kuantitas), masalah kualitas sumber daya manusia, komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.



## JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kendal pada tahun 2019 tercatat sebanyak 97.001 jiwa. Memperhatikan laju pertumbuhan penduduk per tahun periode 2015-2019 maka Pemerintah Kabupaten Kendal patut berbangga karena laju pertumbuhan penduduk pertahun mengalami penurunan. Tahun 2015 penduduk Kendal sejumlah 942.280 jiwa, berikutnya di tahun 2016 sejumlah 949.732 jiwa atau bertambah sebanyak 7.452 jiwa. Pertambahan penduduk Kendal di tahun 2017 sejumlah 7.272, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, pertambahan penduduk Kendal hanya sejumlah

6.693 jiwa. Secara persentase laju pertumbuhan penduduk Kendal tahun 2015 sebesar 0,82 persen, tahun 2016 sebesar 0,79 persen dan terus menurun hingga tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk hanya sebesar 0,69 persen.

**Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kendal, 2015-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan per tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	942.280	0,82	102,82
2016	949.732	0,79	102,81
2017	957.004	0,77	102,79
2018	964.308	0,76	102,75
2019	971.001	0,69	102,76

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2010-2020

Dilihat berdasarkan kecamatan pada periode 2018-2019 terdapat 10 kecamatan yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk kabupaten. Mengamati pertumbuhan penduduk di tingkat kecamatan, terlihat Kecamatan Boja memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 1,48 persen, diikuti Kecamatan Sukorejo 0,98 persen, Kaliwungu Selatan dan Kaliwungu 0,97 persen, Kecamatan Kendal 0,90 persen, Patebon 0,87 persen, Patean 0,82 persen, Singorojo 0,79 persen, Brangsong 0,72 persen, dan Limbangan 0,71 persen. Sementara itu, 10 kecamatan lainnya mengalami laju pertumbuhan penduduk dibawah angka kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Plantungan sebesar 0,14 persen.

*Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Kendal sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Singorojo*

Salah satu indikator kependudukan yang biasa menjadi dasar pengambilan kebijakan adalah tingkat rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Secara umum, indikator tersebut memberikan gambaran perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Kajian kependudukan yang didasarkan pada perbandingan jenis kelamin tersebut biasanya guna menerangkan tingkat kesetaraan gender. Di Indonesia banyak terdapat beranekaragam adat kebudayaan, dimana memberikan pengaruh secara langsung terhadap tingkat kesetaraan gender. Sistem garis keturunan

yang bersifat patrilineal (garis laki-laki) secara langsung berpengaruh pada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya berpengaruh pada komposisi penduduk dalam kegiatan ekonomi.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk Kendal pada tahun 2019 sebesar 102,76. Angka ini berarti jika pada suatu komunitas terdapat 102 orang, maka akan terdiri dari 100 perempuan dan 102 laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kendal lebih banyak daripada jumlah penduduk Perempuan. Kondisi yang sama terjadi di sebagian besar kecamatan di Kendal dengan rasio jenis kelamin lebih dari 100. Hanya ada dua kecamatan yang rasio jenis kelaminnya kurang dari 100, yakni Kecamatan Boja (99,68 persen) dan Kecamatan Kangkung (99,28 persen). Artinya, penduduk perempuan di dua kecamatan tersebut lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

## **PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK**

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit.

Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan kurangnya optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Ditinjau berdasarkan masing-masing kecamatan, pada tahun 2019 terlihat bahwa Kecamatan Kendal, yang merupakan ibukota dari Kabupaten Kendal, memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 2.164 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti Kecamatan Weleri 1.927 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Cepiring 1.640 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu, Kecamatan Singorojo yang merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Kendal memiliki kepadatan penduduk terendah yakni sebesar 426 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara total, perkembangan kepadatan penduduk selama 2015-2019 menunjukkan angka pertumbuhan yang positif di semua wilayah Kendal. Apabila diamati per wilayah, perkembangan kepadatan penduduk di Kecamatan Boja memiliki laju paling tinggi dengan rata-rata kecepatan laju kepadatan pendudu-

**Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2015-2019**

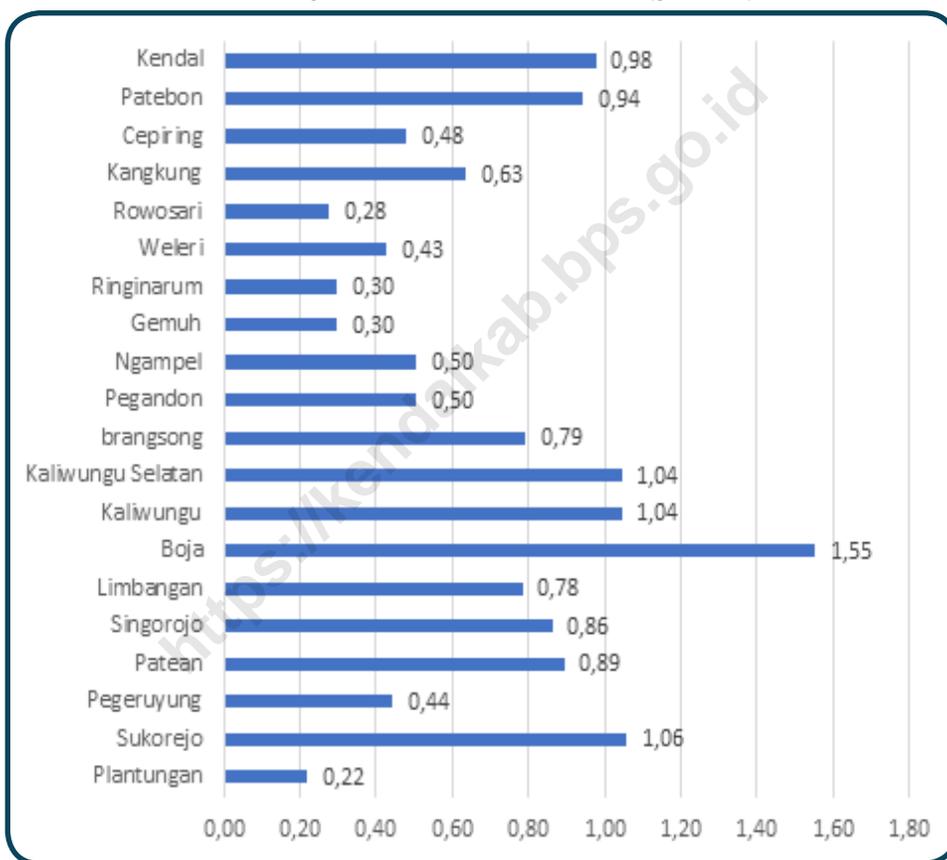
Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Plantungan	601	603	604	605	606
020 Sukorejo	798	806	815	823	832
030 Pageruyung	631	634	636	639	641
040 Patean	534	539	544	549	554
050 Singorojo	412	416	419	423	426
060 Limbangan	449	452	456	460	463
070 Boja	1.179	1.198	1.217	1.235	1.254
080 Kaliwungu	1.301	1.315	1.329	1.343	1.356
081 Kaliwungu Selatan	725	732	740	748	755
090 Brangsong	1.356	1.367	1.377	1.388	1.398
100 Pegandon	1.109	1.115	1.121	1.127	1.131
101 Ngampel	948	953	958	963	967
110 Gemuh	1.215	1.219	1.223	1.226	1.229
111 Ringinarum	1.386	1.391	1.395	1.399	1.402
120 Weleri	1.895	1.904	1.912	1.920	1.927
130 Rowosari	1.444	1.448	1.452	1.456	1.459
140 Kangkung	1.124	1.132	1.139	1.146	1.152
150 Cepiring	1.610	1.618	1.626	1.633	1.640
160 Patebon	1.302	1.315	1.327	1.339	1.351
170 Kendal	2.083	2.103	2.124	2.145	2.164
<b>Kabupaten Kendal</b>	<b>941</b>	<b>948</b>	<b>955</b>	<b>963</b>	<b>969</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

knya sebesar 1,55 persen per tahun selama periode tersebut. Selanjutnya, laju kepadatan penduduk tercepat diikuti oleh Kecamatan Sukorejo (1,06 persen per tahun), Kaliwungu (1,04 persen per tahun) dan Kaliwungu Selatan (1,04 persen per tahun). Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Boja dan Kaliwungu berbatasan langsung dengan Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, yang ten-

tunya memiliki daya tarik yang kuat dibandingkan daerah lainnya. Kota Semarang sebagai sentra pemerintahan serta sentra bisnis mendorong wilayah sekitarnya untuk turut berperan dalam perekonomian sebagai daerah penyangga Kota Semarang.

**Gambar 1.1 Rata-Rata Pertumbuhan Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Kendal, 2015-2019 (persen)**



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020



## ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Masalah lain yang timbul sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk adalah semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting untuk melihat tingkat peroduktifitas penduduk. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk

membayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil bisa diartikan telah ada kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2015-2019 angka beban ketergantungan di Kendal cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan program pemerintah terkait pengendalian penduduk dapat dikatakan cukup berhasil karena semakin sedikit beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Pada tahun 2015 angka beban ketergantungan Kendal sebesar 46,06 persen. Meskipun lambat, angka beban ketergantungan Kendal terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2019 berada pada posisi 45,52 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 46 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

*Sejak tahun 2015, Kabupaten Kendal telah mengalami bonus demografi (komposisi penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usia non produktif)*

**Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Kendal, 2015-2019**

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	232.615	645.124	64.541	46,06
2016	231.572	651.328	66.832	45,81
2017	230.532	657.147	69.325	45,63
2018	229.666	662.573	72.069	45,54
2019	228.659	667.282	75.060	45,52

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

Rasio ketergantungan yang cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi sumber daya manusia guna mendorong produksi, yaitu saat terjadi fenomena Bonus Demografi. Namun

perlu diketahui bahwa bonus demografi mempunyai dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik.

Jika dilihat berdasarkan komposisi penduduk sesuai dengan kelompok umur, menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun). Pada tahun 2015 ada sebanyak 24,96 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun). Pada tahun 2019, proporsi penduduk usia muda di Kendal turun menjadi 23,55 persen.

Salah satu misi pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal 2016-2021 adalah “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan.” Jika melihat komposisi usia muda yang proporsinya semakin menurun dari tahun ke tahun, dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah Kendal dalam pengendalian penduduk cukup berhasil menekan angka kelahiran penduduk.

Selanjutnya struktur umur penduduk Kendal selama periode 2015-2019 masih didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Proporsi penduduk usia produktif di Kendal pada tahun 2015 mencapai 68,46 persen dan terus meningkat mencapai 68,72 persen di tahun 2019. Sementara itu, proporsi penduduk usia tua (65 tahun keatas) juga semakin lama semakin meningkat dari 6,85 persen di tahun 2015 hingga mencapai 7,73 persen di tahun 2019. Keadaan ini menunjukkan bahwa program peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kendal cukup berhasil terutama dalam meningkatkan kondisi kesehatan lansia sehingga para lansia tersebut mampu menikmati kehidupan yang lebih lama.



## PENGGUNAAN ALAT ATAU CARA KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Penerapan program KB dilakukan dengan pengenalan berbagai jenis alat kontrasepsi ke masyarakat. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk keikutsertaan peserta KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan dengan lebih baik lagi.

**Tabel 1.4 Persentase Perempuan Berstatus Pernah Kawin dan Berumur 15-49 Tahun menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2017-2018**

Status Penggunaan Alat KB/Cara Tradisional untuk Menunda Kehamilan	2017	2018
	(1)	(2)
Pernah	18,45	12,64
Sedang	55,20	59,69
Tidak Pernah	26,35	27,67
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

Capaian yang patut diapresiasi bahwa berdasarkan data Susenas, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB di tahun 2018 sebesar 58,10 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 55,20 persen. Jika dilihat berdasarkan karakteristik pengguna, wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin dengan golongan pengeluaran 40 persen kebawah paling banyak yang berstatus sedang menggunakan alat KB (71,40 persen) dibandingkan dengan wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin pada golongan pengeluaran lainnya.

**Tabel 1.5 Persentase Perempuan Berstatus Pernah Kawin dan Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2018**

Karakteristik	Status Penggunaan Alat KB/Cara Tradisional untuk Menunda Kehamilan			Total
	Pernah	Sedang	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Golongan Pengeluaran</b>				
40 persen terbawah	10,58	71,40	18,03	100,00
40 persen tengah	12,74	55,58	31,68	100,00
20 persen teratas	16,37	46,05	37,58	100,00
<b>Pendidikan Tertinggi ART</b>				
SD ke bawah	13,73	61,59	24,68	100,00
SMP ke atas	11,91	58,41	29,68	100,00

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

*Semakin tinggi pendidikan wanita dan semakin tinggi rata-rata pengeluaran, maka wanita tersebut cenderung untuk tidak ber-KB*

Sementara menurut pendidikan, wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang berpendidikan SD kebawah paling banyak yang berstatus sedang menggunakan alat KB (61,59 persen). Jika ditinjau berdasarkan karakteristik, ada kecocokan bahwa wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin dengan golongan pengeluaran 40 persen terbawah yang umumnya berpendidikan rendah, banyak yang menggunakan alat KB. Semakin meningkatnya jumlah akseptor KB memang merupakan harapan pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dengan diberikan banyak pilihan alat/cara KB maka keinginan masyarakat untuk ber-KB akan semakin meningkat.

Seseorang menentukan pilihan dalam penggunaan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, harga, kepraktisan dalam penggunaan, efisiensi, tingkat resiko kegagalan serta resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan kenyamanan bagi penggunanya. Berbagai macam alat/cara KB digunakan oleh pasangan usia subur di Kendal namun yang paling banyak peminatnya adalah penggunaan alat KB suntik dan pil yang bersifat jangka pendek. Pil dan suntik termasuk alat KB Non-MKJP (tidak termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang rawan putus dalam penggunaannya.

**Tabel 1.6 Akseptor KB Aktif di Kabupaten Kendal, 2016-2018**

Jenis Kontrasepsi	Tahun		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>IUD (Intrauterine device)</b>	8.103	13.600	7.594
<b>Implant</b>	17.994	20.620	16.295
<b>MO (Metode Operasi)</b>	6.498	6.966	5.808
<b>Pil</b>	29.388	26.348	18.914
<b>Kondom</b>	665	858	691
<b>Suntik</b>	91.817	93.919	75.567
<b>Total</b>	<b>154.465</b>	<b>162.311</b>	<b>124.869</b>

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

Kepala BKKBN menyatakan bahwa untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, penggunaan MKJP akan lebih efektif. Namun, tidak mudah untuk mendorong masyarakat agar mau menggunakan alat KB MKJP. Terbukti penggunaan alat KB MKJP pada tahun 2018 di Kendal hanya sebesar 29.697 orang atau 23,78 persen dari seluruh akseptor KB aktif. Tingkat penggunaan alat KB MKJP masih sangat kecil bahkan kurang dari 7 persen untuk metode IUD dan metode operasi. Sebaliknya, penggunaan suntik pada tahun 2018 mencapai lebih dari 50 persen dari pasangan usia subur yang sedang menggunakan alat/cara KB meskipun selama tahun 2017-2018 ada penurunan. Penggunaan alat/cara KB jangka pendek terbesar kedua adalah pil mencapai 15,15 persen pada tahun 2018, jumlah ini menurun dibandingkan 2017 yang tercatat sebesar 16,23 persen.

<https://kendalkab.bps.go.id>







# **BAB 2**

# **KESEHATAN DAN GIZI**



Umur yang panjang dan hidup yang sehat merupakan harapan bagi setiap individu. Individu yang sehat secara fisik dan mental akan lebih energik dan kuat, serta lebih produktif dibandingkan individu yang kurang sehat. Selain itu, hidup akan menjadi kurang berarti apabila diberikan usia yang panjang namun rentan terserang penyakit ataupun mengidap penyakit kronis. Pemerintah selaku pemegang wewenang memiliki peran penting dalam bidang kesehatan, terutama dalam penetapan standar kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Namun, mewujudkan penduduk dengan umur yang panjang dan hidup yang sehat bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah.

Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, sejak April 2016 Kementerian Kesehatan RI menyosialisasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Inti dari program tersebut adalah pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku, dari perilaku hidup yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. Program tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kematian akibat penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, hingga kanker yang lebih banyak diakibatkan oleh perilaku tidak sehatnya masyarakat Indonesia. Padahal, hampir 90 persen penyakit berkategori penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, kanker, HIV AIDS, diabetes, dan lain sebagainya sebenarnya bisa dicegah dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan GERMAS meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan, pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas hidup, serta peningkatan edukasi hidup sehat.

Pemerintah Kabupaten Kendal menuangkan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam RPJMD 2016-2021 dan dalam pelaksanaannya pemerintah sudah melakukan berbagai program khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan Angka Kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatkan Angka Harapan Hidup. Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan bidang kesehatan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan po-

syandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Program di bidang kesehatan tersebut tidak akan pernah berhasil tanpa adanya partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, penguatan peran masyarakat untuk lebih bertanggungjawab atas derajat kesehatannya sendiri dan fasilitasi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyadarkan dan menumbuhkan kemampuan upaya kesehatan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk menilai sejauh mana efektifitas program pemerintah di bidang kesehatan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, perlu dirumuskan berbagai indikator di bidang kesehatan.



## DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk, dilakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan. Angka kesakitan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan terganggu aktifitasnya sehari-hari yang terjadi selama satu bulan sebelum pencacahan. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan menderita sakit berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut.

Menurut *Hendrik L. Blumm* seorang profesor emeritus administrasi kesehatan dan perencanaan di *University of California*, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu: faktor perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Faktor keturunan merupakan faktor yang paling sulit dalam mengatasinya jika penyakit sudah diderita, yang terbaik adalah pencegahan yang dilakukan sebelum penyakit secara keturunan ini muncul. Tiga

faktor lain dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat antara lain semakin baik dan semakin mudah akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam memberikan dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya ak-

*Wanita lebih rentan sakit dibanding laki-laki. Dan, penduduk pada golongan pengeluaran 40 persen menengah lebih rentan sakit dibandingkan golongan lain.*

**Tabel 2.1 Angka Kesakitan menurut Karakteristik Penduduk di Kabupaten Kendal, Tahun 2017-2018**

Karakteristik	Angka Kesakitan	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	17,95	16,84
Perempuan	20,88	17,16
<b>Golongan Pengeluaran</b>		
40 Persen Terbawah	32,60	15,80
40 Persen Menengah	40,53	18,25
20 Persen Teratas	23,83	16,86
<b>Kendal</b>	<b>19,40</b>	<b>16,99</b>

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

tivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti derajat kesehatan di wilayah tersebut semakin rendah atau menunjukkan bahwa angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Jika melihat di Tabel 2.1, angka kesakitan penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2018 mencapai 16,99 persen, menurun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 19,40 persen. Artinya, derajat kesehatan masyarakat Kendal menunjukkan peningkatan karena lebih sedikit penduduk yang mengalami sakit di tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan golongan pengeluaran, angka kesakitan penduduk dengan golongan 40 persen menengah (18,25 persen) paling tinggi dibandingkan angka kesakitan penduduk 40 persen terendah (15,80 persen) dan angka kesakitan penduduk 20 persen teratas (16,86 persen). Sementara persentase penduduk kabupaten Kendal yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir pada tahun 2018 sebesar 38,56 persen, dengan komposisi 36,89 persen penduduk laki-laki dan 40,27 persen penduduk perempuan. Artinya, penduduk perempuan di Kendal lebih banyak yang mengalami keluhan kesehatan dibanding penduduk laki-laki.



## PEMANFAATAN FASILITAS DAN JAMINAN KESEHATAN

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan, sehingga penduduk dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa mengalami kesulitan. Kemudahan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan dapat dilihat dari akses ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan bagi penduduk. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan.

**Tabel 2.2 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kendal, 2018**

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Rumah Sakit Umum	5
Poliklinik	46
Puskesmas	40
Puskesmas Pembantu	55
Posyandu	1.423
<b>Total</b>	<b>1.569</b>

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka, 2019

Pada Tabel 2.2 menyajikan Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kendal, meliputi rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu. Ada sejumlah 5 rumah sakit di Kabupaten Kendal, yaitu satu rumah sakit negeri milik pemerintah (RSUD Dr. Soewondo) yang bertempat di Kecamatan Kendal dan empat rumah sakit swasta yang masing-masing bertempat di Kecamatan Kaliwungu Selatan (RS Darul Istiqomah), Kecamatan Gemuh (RS Baitul Hikmah sejumlah dua rumah sakit) dan Kecamatan Weleri (RS Islam Muhammadiyah). Selain itu ada sejumlah 46 poliklinik, 40 puskesmas, 55 puskesmas pembantu dan 1.423 posyandu yang lokasinya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal.

Dari sisi jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kendal, sudah seluruhnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Bahkan ada fasilitas kesehatan yang sangat mudah diakses oleh masyarakat dan menjangkau hingga ke desa-desa, yakni posyandu. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kes-

**Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin, 2017-2018**

Jenis Kelamin	Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	28,57	40,07
Perempuan	29,61	31,51
<b>Kendal</b>	<b>29,15</b>	<b>35,44</b>

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

ehatan penduduk melalui penyediaan sarana kesehatan di Kendal terlihat sudah sangat baik dan perlu untuk dipertahankan.

Pembangunan nasional di bidang kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Selain melalui penyediaan sarana kesehatan, pemerintah berupaya menyediakan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dengan adanya jaminan kesehatan tersebut, diharapkan kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Dari Tabel 2.3 terlihat sejumlah 35,44 persen penduduk Kabupaten Kendal menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2018. Meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 29,15 persen. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2018 terlihat penduduk laki-laki lebih banyak yang memanfaatkan jaminan kesehatan untuk berobat, sebesar 40,07 persen. Sementara pada tahun 2017, penduduk perempuanlah yang lebih banyak menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat (29,61 persen).

Pemerintah telah berupaya memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan akses fasilitas kesehatan dengan memberikan jaminan kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin melalui program BPJS PBI dan Jamkesda. Kendati demikian, masih dijumpai pula masyarakat yang enggan memanfaatkan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Ditinjau berdasarkan golongan pengeluaran, pada tahun 2018 penduduk golongan pengeluaran 20 persen teratas paling banyak memanfaatkan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, sebesar 45,10 persen. Sementara penduduk golongan pengeluaran 40 persen terbawah yang memanfaatkan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebesar 36,19 persen dan golongan pengeluaran 40 persen menengah yang memanfaatkan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebesar 29,98 persen.



## TINGKAT IMUNITAS DAN GIZI BALITA

Selain pemenuhan gizi ibu selama kehamilan, sangat dianjurkan untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

**Tabel 2.4 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang pernah mendapat Imunisasi menurut Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi, 2017**

Karakteristik	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Cam-pak/ Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Jenis Kelamin</b>					
Laki-Laki	89,30	86,71	89,99	75,65	89,80
Perempuan	92,53	88,99	91,87	72,33	88,67
<b>Pendidikan Tertinggi KRT</b>					
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	97,75	90,04	96,79	69,78	-
SD/Sederajat	87,98	83,99	87,05	70,18	-
SMP/Sederajat	93,52	94,57	94,57	80,45	-
SMA Ke Atas	88,87	87,18	90,38	78,13	-
<b>Kendal</b>	<b>90,88</b>	<b>87,82</b>	<b>90,91</b>	<b>74,03</b>	<b>89,25</b>

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap berbagai penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak

dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan mendapatkan kekebalan dari beberapa penyakit berbahaya, memperkecil resiko untuk sakit dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B. Imunisasi tersebut dikatakan lengkap jika seorang bayi telah melaksanakan satu kali imunisasi BCG, 3 kali imunisasi DPT, 3 kali imunisasi polio, 1 kali imunisasi campak/MR dan 3 kali imunisasi hepatitis B.

Berdasarkan hasil Susenas 2017, dilihat berdasarkan masing-masing jenis imunisasi, tanpa melihat berapa kali pernah dilakukan imunisasi tersebut, rata-rata lebih dari 90 persen balita sudah melaksanakan imunisasi BCG, DPT, Polio, dan Hepatitis B. Hanya imunisasi campak yang persentasenya belum mencapai 80 persen. Secara umum, pemberian imunisasi balita di Kendal terlihat sudah cukup baik karena sudah menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Rata-rata persentase pemberian imunisasi berdasarkan pendidikan tertinggi KRT untuk hampir semua jenis imunisasi sudah mencapai lebih dari 85 persen. Hanya imunisasi campak saja yang persentasenya masih dibawah 85 persen, terutama pada pendidikan KRT SD kebawah yang hanya mencapai 69,78 persen. Faktor yang menghambat pemberian imunisasi campak dan masih banyaknya balita yang belum terimunisasi secara lengkap perlu dilakukan penelitian dan dilakukan terobosan dari pemerintah khususnya Dinas Kesehatan sehingga pencapaiannya mampu lebih baik lagi.

*Imunisasi dengan persentase terendah adalah imunisasi campak (74 persen), terutama pada pendidikan KRT SD kebawah (70 persen)*





# **BAB 3**

# **PENDIDIKAN**

<https://kendalkab.go.id>



Jumlah penduduk yang besar merupakan suatu potensi, namun dapat juga menjadi sumber permasalahan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terlebih pada era revolusi industri 4.0 saat ini, keberhasilan suatu negara di kancah internasional tidak hanya ditentukan oleh keunggulan komparatif, seperti kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Keunggulan kompetitif, yang dalam hal ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, justru menjadi faktor yang lebih penting. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas suatu negara mampu mengatur perekonomiannya sehingga mampu bersaing dengan negara lain.

Pembangunan di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, misalnya ketersediaan sumber daya alam, finansial, perencanaan yang matang dan lain sebagainya. Pembangunan tersebut tentu dapat terlaksana dengan baik jika ditopang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kuantitas, dapat dikatakan bahwa jumlah sumber daya manusia (SDM) telah sangat tersedia. Namun, dari segi kualitas perlu diberikan perhatian khusus agar dapat tercipta SDM yang tangguh dan berdaya guna tinggi.

Peningkatan kualitas SDM harus tetap dilakukan, dengan harapan SDM yang berkualitas mampu berpengaruh positif terhadap pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga harus dilakukan guna setiap individu mampu menghadapi tantangan dan persaingan global. Salah satu komponen primer yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam peningkatan kualitas SDM adalah sektor pendidikan, hal ini disebabkan pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan penentu kemajuan suatu bangsa dimasa depan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam upaya pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.



Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas utama dalam setiap program pemerintah karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Titik berat pendidikan formal lebih ditekankan pada upaya menaikkan mutu pendidikan, memperluas pendidikan dasar, dan meningkatkan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain adalah pengadaan dan peningkatan sarana pendidikan, program wajib belajar, pemberian beasiswa, dan lain-lain. Pendidikan memiliki andil yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa secara ekonomi dan sosial, sehingga keberhasilan pembangunan di bidang ini dapat menjadi salah satu parameter utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Rasio Murid Guru dan Rasio Murid Kelas, serta Persentase Kepala Sekolah dan Guru menurut tingkat pendidikan. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.



## **RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN HARAPAN LAMA SEKOLAH**

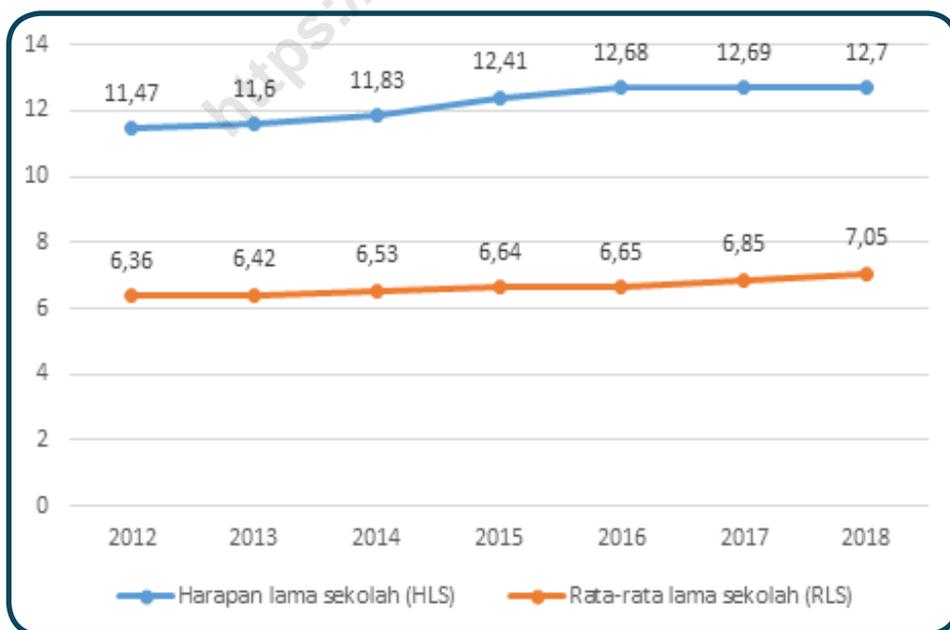
Peningkatan kualitas pendidikan memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan pembangunan manusia karena pendidikan membawa dampak positif yang nyata pada mendatang. Penurunan angka putus sekolah menjadi program prioritas dalam kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah. Peningkatan

tenaga pengajar melalui kegiatan pelatihan juga terus dilakukan. Selain program langsung, peningkatan sarana pendidikan melalui pembangunan serta revitalisasi gedung-gedung sekolah juga telah dilakukan. Diharapkan dengan adanya fasilitas pendidikan yang semakin memadai dapat semakin menunjang program peningkatan kualitas pendidikan yang sedang digalakan.

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM selain harapan lama sekolah adalah rata-rata lama sekolah atau Mean Years School (MYS). Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang mampu dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia pada suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kelemahan estimasi sebelumnya, yaitu dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani sehingga semakin tinggi pula kualitas intelektual penduduk suatu daerah.

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk umur 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata lama sekolah dapat mengindikasikan sampai sejauh mana tingkat pendidikan yang dijalani oleh seseorang. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

**Gambar 3.1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal (tahun), 2012-2018**



Sumber: Diolah dari hasil Susenas

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kendal tumbuh rata-rata 1,74 persen per tahun selama periode 2012 hingga 2018. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Kendal yang lebih baik. Kesadaran akan betapa pentingnya pendidikan juga menjadi faktor kunci keberhasilan dalam peningkatan angka rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2018 terjadi lonjakan pada rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kendal tahun 2018 sebesar 7,05 tahun dari semula 6,85 tahun, atau tumbuh 2,91 persen. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Kendal menyelesaikan pendidikan formal hingga kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan pembenahan bidang pendidikan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi kendala yang telah dihadapi guna meningkatkan kesempatan mengenyam pendidikan hingga minimal 9 tahun.

*Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal telah mencapai kelas VII SMP. Sedangkan harapan lama-sekolah sampai lebih dari kelas XII SMA*

Indikator pendidikan lainnya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui gambaran sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan yang diperlihatkan dalam lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan di suatu wilayah maka akan memperbesar harapan seorang anak untuk dapat mengenyam pendidikan pada masa mendatang.

Selama periode 2012 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kendal telah meningkat sebesar 1,23 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,69 tahun. Selama periode 2012 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,73 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2018, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kendal telah mencapai 12,70 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.



## ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator tersebut selalu menunjuk-

kan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Berdasarkan data Susenas, secara umum terjadi penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2017 ke 2018. Penurunan APS terjadi pada kelompok usia 7-12 tahun, dari semula bernilai sempurna atau 100 persen pada tahun 2017 menjadi 99,44 persen di tahun 2018. Penurunan terjadi karena menurunnya angka APS laki-laki di tahun 2018 menjadi sebesar 98,91 persen dari yang semula sudah bernilai sempurna (100 persen). Kendati menurun, angka yang dicapai tergolong memuaskan karena nilainya mendekati 100 persen.

Kondisi yang sama juga berlaku untuk kelompok usia 13-15 tahun yaitu peningkatan APS terjadi pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan usia 15 tahun (usia SMP) kesempatan belajar masih terbuka secara luas baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, untuk jenjang usia 16-18 tahun, APS masih di bawah 80 persen. Meskipun masih dibawah 80 persen, APS laki-laki maupun perempuan usia 16-18 tahun meningkat menjadi 73,03 persen pada tahun 2018 untuk laki-laki dan 68,17 persen pada tahun 2018 untuk perempuan. Dari angka APS terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk laki-laki di Kendal lebih baik daripada penduduk perempuan. Meskipun jaman sudah berubah namun di sebagian masyarakat kita masih ada sebagian yang berpegang pada pandangan kolot bahwa anak perempuan tak perlu sekolah terlalu tinggi, karena nanti hanya akan masuk dapur. Pandangan seperti inilah yang terkadang masih menghambat kemajuan perempuan.

**Tabel 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal, 2017-2018**

Kelompok Umur	2017			2018		
	Laki-Laki	Perempuan	L+P	Laki-Laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	100,00	100,00	100,00	98,91	100,00	99,44
13-15	90,76	98,09	93,99	92,41	95,40	93,79
16-18	68,77	55,57	62,81	73,03	68,17	70,68

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sekolah sesuai jenjang pendidikan, indikator APM memang lebih relevan. Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Sama halnya dengan APS, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kendal mengalami penurunan pada tahun 2017-2018. Hanya APM SMA/Sederajat yang mengalami peningkatan. Jika dilihat menurut jenis kelamin, Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA tidak berbeda jauh antara laki-laki dan perempuan. APM laki-laki mengalami sedikit penurunan pada jenjang SMP/ sederajat dari 71,37 persen pada tahun 2017 menjadi 69,58 pers-

**Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal, 2017-2018**

Kelompok Umur	2017			2018		
	Laki-Laki	Perempuan	L+P	Laki-Laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/ sederajat	96,07	94,20	95,05	94,54	93,16	93,87
SMP/ sederajat	71,37	79,56	74,98	69,58	74,16	71,69
SMA/ sederajat	62,28	51,60	57,45	65,36	58,04	61,83

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

en pada tahun 2018. Pada perempuan, penurunan APM juga terjadi pada jenjang SMP/ sederajat dari 79,56 persen pada tahun 2017 sedikit menurun menjadi 74,16 persen pada tahun 2018.

Capaian APM jenjang SD/ sederajat pada tahun 2017 telah mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (94,80 persen), namun pada tahun 2018 kembali turun. Oleh karena itu, pekerjaan pemerintah berikutnya adalah mengupayakan agar target pencapaian APM jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat dapat tercapai pada tahun 2019.

Dalam dua tahun kedepan, APM jenjang SMP/ sederajat perlu meningkat sekitar 7,02 persen dan APM SMA/ sederajat perlu meningkat sekitar 10,05 persen. Hal ini berarti, pekerjaan pemerintah berikutnya adalah terus mengupayakan agar target RPJMD 2016-2021, APM tingkat SMP/ sederajat maupun SMA/ sederajat dapat tercapai pada tahun 2019.



## KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya ma-

nusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain jumlah sekolah, murid, dan guru, rasio murid-guru, serta rasio guru-sekolah.

**Tabel 3.3 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Kendal, 2017-2018**

Kelompok Umur	Sekolah		Murid		Guru	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/Sederajat	669	669	98.549	97.874	6.007	5.428
SMP/Sederajat	106	153	34.036	46.403	1.886	2.101
SMA/Sederajat	34	49	12.334	16.976	754	1.043
SMK	50	50	22.767	23.345	1.278	1.292
Jumlah	859	921	167.686	184.598	9.925	9.864

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka, 2019

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, (Tabel 3.3), Jumlah fasilitas sekolah dasar (SD) yang ada di Kabupaten Kendal baik negeri, swasta, maupun madrasah ibtidaiyah pada tahun 2018, sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 669 sekolah. Jumlah murid sekolah dasar pada tahun 2017 adalah 97.874 orang, sedangkan jumlah guru yang mengajar di SD sebanyak 5.428 orang.

Selain itu, jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tercatat di Kabupaten Kendal pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga menjadi 153 sekolah. Jumlah murid SMP baik negeri, swasta, maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) juga mengalami peningkatan menjadi 46.403 orang.

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui pula, 2.101 orang guru mengajar pada SMP di Kabupaten Kendal. Sementara itu, jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tercatat di Kabupaten Kendal ada sebanyak 49 sekolah. Jumlah murid Sekolah Menengah Atas baik negeri, swasta, maupun Madrasah Aliyah sebanyak 16.976 orang.

Indikator selanjutnya yakni rasio murid-guru, yang merupakan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan

cenderung semakin rendah. Dengan kata lain, jika rasio tinggi, ini berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Semakin banyak jumlah murid di dalam suatu kelas dengan jumlah pengajar hanya 1 orang maka akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektifitas pengajaran. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogi, pendalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar, dan variasi dalam kelas.

**Tabel 3.4 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah di Kabupaten Kendal, 2015/2016-2018/2019**

Tahun Ajaran	Rasio Murid-Guru			Rasio Guru-Sekolah		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ SMK/ Sederajat	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ SMK/ Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015/2016	15	16	13	9	21	30
2016/2017	16	16	15	9	20	26
2017/2018	16	18	17	9	18	24
2018/2019	18	22	17	8	14	24

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka, 2019

Secara umum, selama empat tahun terakhir dari tahun ajaran 2015/2016 sampai 2018/2019 terjadi peningkatan rasio murid-guru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sementara untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) cenderung stagnan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan rasio murid-guru menunjukkan bahwa peningkatan jumlah siswa tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah guru. Dikhawatirkan jika jumlah rasio murid-guru meningkat, menyebabkan beban guru menjadi lebih berat dan proses belajar mengajar menjadi kurang efektif.

Rasio guru-sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Semakin rendah nilai rasio berarti jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu jenjang pendidikan tertentu semakin terbatas, sebaliknya semakin besar nilai rasio mengindikasikan kemungkinan terjadinya kelebihan tenaga pengajar pada sekolah tersebut, sehingga kebijakan berupa mutasi guru perlu dilakukan.

Secara umum, selama 4 tahun terakhir dari tahun 2015/2016 sampai 2018/2019 terdapat tendensi penurunan rasio guru-sekolah pada semua jenjang pendidikan. Penurunan rasio guru-sekolah kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya jumlah sekolah baru dan dikhawatirkan dapat menyebabkan proses belajar mengajar menjadi kurang efektif karena jumlah tenaga pengajar kurang berimbang.

<https://kendalkab.bps.go.id>





# BAB 4 KETENAGAKERJAAN



**P**ermasalahan di bidang ketenagakerjaan harus terus menjadi perhatian pemerintah agar dapat segera diselesaikan, diantaranya tingginya tingkat pengangguran, masih rendahnya perluasan kesempatan kerja, rendahnya produktivitas kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan sebagainya. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan Kabupaten Kendal ke depan. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diupayakan memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan, sangat dibutuhkan data dan informasi ketenagakerjaan. Strategi dan program ketenagakerjaan yang tepat sangat ditentukan kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu bekerja dan pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja mencakup sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Secara alamiah pertumbuhan angkatan kerja searah dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran kerja dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai keadaan angkatan kerja di Kabupaten Kendal. Beberapa indikator yang dianalisa mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penduduk bekerja dan pekerja anak. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

*Dalam RPJMD Kabupaten Kendal 2016-2021, pengangguran menjadi fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ketenagakerjaan. Hal ini dilatarbelakangi karena pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.*



## TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran Terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

TPAK Kendal di tahun 2018 sebesar 66,10 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 66,49 persen. TPAK yang besar belum menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik karena TPAK tersebut merupakan perbandingan dari jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Jika besarnya TPAK berasal dari jumlah angkatan kerja yang bekerja, maka dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik karena penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi jika berasal dari angkatan kerja yang menganggur justru akan menimbulkan persoalan tersendiri.

**Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal, 2017-2018 (%)**

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	81,54	81,38	4,80	6,16
Perempuan	51,13	50,51	5,14	5,91
<b>Kendal</b>	<b>66,49</b>	<b>66,10</b>	<b>4,93</b>	<b>6,06</b>

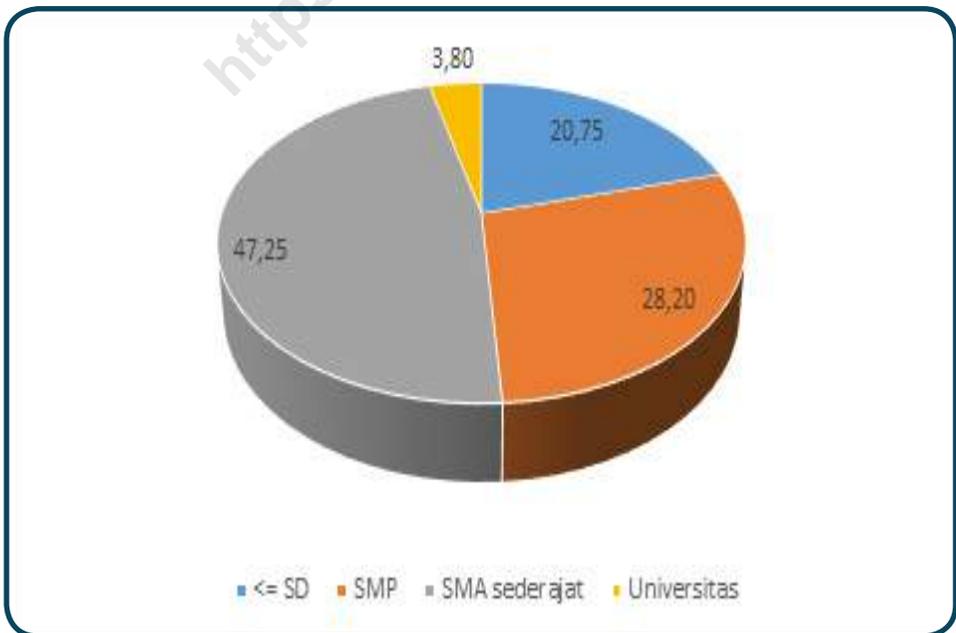
Sumber: Diolah dari hasil Sakernas

Ditinjau menurut jenis kelamin, TPAK di laki-laki lebih tinggi dari perempuan dari tahun ke tahun. Artinya, penduduk laki-laki lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Budaya masyarakat Jawa bahwa perempuan tidak diperbolehkan bekerja atau lebih utama mengurus rumah tangga terbukti masih kental di Kendal karena hanya sebesar 50,51 persen penduduk perempuan yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Perkembangan TPT di Kendal selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan dari 4,93 persen di tahun 2017 menjadi 6,06 persen di 2018. Kondisi ini perlu diteliti lagi lebih jauh, apakah tingginya jumlah pengangguran di Kendal ini diakibatkan oleh minimnya lapangan pekerjaan, ataukah ada kecenderungan mereka yang berpendidikan menengah ke atas lebih memilih-milih pekerjaan dibandingkan yang pendidikan rendah, sehingga mereka setelah selesai sekolah tidak segera memperoleh pekerjaan.

*Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018, laki-laki mempunyai kecenderungan yang lebih besar dari perempuan untuk menganggur*

**Gambar 4.1 Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Damatkan di Kabupaten Kendal, 2018 (persen)**



Sumber: Diolah dari hasil Sakernas



Pendidikan yang tinggi merupakan jembatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan pendapatan besar. Hampir semua orang berkeinginan bekerja dengan penghasilan yang tinggi, untuk itu mereka berupaya untuk memperoleh pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahliannya. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak segera mendapatkan pekerjaan lebih memilih menunggu pekerjaan yang sesuai, atau dengan kata lain menjadi penganggur untuk sementara waktu.

Melihat struktur TPT menurut tingkat pendidikan, ada kecenderungan TPT lebih tinggi untuk tingkat pendidikan menengah tinggi. Pada tingkat pendidikan rendah dan yang belum pernah bersekolah hampir semua angkatan kerja dapat tertampung di lapangan pekerjaan dengan segala kondisi dan jenis pekerjaan. TPT pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat merupakan TPT tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu 47,25 persen pada tahun 2018. Sementara TPT pada tingkat pendidikan perguruan tinggi masih lebih rendah dibandingkan tingkat SMA/ sederajat, hanya sebesar 28,20 persen. Hal ini disebabkan jumlah tamatan perguruan tinggi tidak sebanyak SMA sehingga sebagian besar lulusan perguruan tinggi masih cukup tertampung pada lapangan pekerjaan yang ada.



## LAPANGAN PEKERJAAN DAN STATUS PEKERJAAN

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran sektor mana yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dikelompokkan menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu primer (pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalan), sekunder (industri pengolahan; pengadaan listrik, gas; pengadaan air serta konstruksi), dan tersier (perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya).

**Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Sektor di Kabupaten Kendal, 2017 - 2018**

Sektor	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Primer*	31,49	30,95	22,07	18,67	27,92	26,30
Sekunder**	30,76	17,93	27,92	31,20	29,68	22,95
Tersier***	37,75	51,12	50,01	50,14	42,40	50,75

Sumber: Diolah dari hasil Sakernas

Catatan :

\*Sektor Primer meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian.

\*\*Sektor Sekunder meliputi Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; serta Bangunan.

\*\*\*Sektor Tersier meliputi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Lainnya.

Melihat perkembangan lapangan usaha selama 2017-2018, persentase penduduk yang bekerja pada sektor primer semakin menurun, yang semula pada tahun 2017 sebesar 27,92 persen menjadi 26,30 persen pada tahun 2018. Lapangan usaha pertanian memiliki porsi terbesar pada sektor primer semakin lama kekuatannya dalam menyerap tenaga kerja semakin melemah. Ketergantungan pertanian terhadap kondisi iklim menjadi salah satu penyebab lapangan usaha ini kurang diminati oleh para pekerja milenial, akibatnya penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha ini semakin menurun. Kondisi yang sama terjadi pula pada sektor sekunder yang pada tahun 2017-2018 penyerapan tenaga kerjanya semakin menurun. Pada tahun 2017 sektor sekunder mampu menyerap tenaga kerja 28,68 persen dan menjadi 22,95 persen di tahun 2018. Sebaliknya, sektor tersier menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kendal dan setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2017 sektor tersier mampu menyerap 42,40 persen tenaga kerja dan meningkat menjadi 50,75 persen di tahun 2018.

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, pada periode 2017-2018 terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja laki-laki dari sektor sekunder ke sektor tersier. Pada tahun 2017 sebanyak 30,76 persen penduduk laki-laki bekerja di sektor sekunder dan 37,75 persen di sektor tersier. Namun, pada 2018, penduduk laki-laki yang bekerja di sektor sekunder menurun drastis sebesar 17,93 persen sementara penduduk laki-laki yang bekerja di sektor tersier sebesar 51,12 persen. Jika ditilik berdasarkan lapangan usaha, pergeseran penyerapan tenaga kerja

ini terjadi pada sektor industri pengolahan dan konstruksi sebagai akibat dari berakhirnya proyek jalan tol Semarang-Batang di akhir 2018.

Indikator untuk melihat gambaran tentang status/kedudukan pekerja dalam aktivitas pekerjaan yang dijalani adalah distribusi tenaga kerja menurut status pekerjaan utama. Berdasarkan status pekerjaan utama selama beberapa tahun terakhir, mayoritas penduduk Kendal bekerja sebagai buruh/karyawan, disusul berusaha sendiri, selanjutnya berusaha dibantu pekerja tak dibayar pada urutan ketiga.

**Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Kendal, 2017– 2018**

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha Sendiri	15,33	16,36	18,38	22,39	16,48	18,65
Berusaha Dibantu Pekerja Tak Dibayar	18,03	11,97	15,93	10,41	17,24	11,38
Berusaha Dibantu Pekerja Tetap	3,77	3,71	2,57	0,55	3,31	2,51
Buruh/Karyawan	41,81	40,09	43,61	43,14	42,49	41,24
Pekerja Bebas Pertanian	6,68	10,68	3,20	4,56	5,36	8,36
Pekerja Bebas Non Pertanian	10,85	13,15	0,51	2,75	6,93	9,20
Pekerja Keluarga	3,53	4,04	15,80	16,22	8,18	8,66

Sumber: Diolah dari hasil Sakernas

Melihat perkembangan status pekerjaan selama periode 2017-2018, persentase buruh/karyawan menurun dari 42,49 persen pada tahun 2017 menjadi 41,24 persen di tahun 2018. Sebaliknya, terjadi peningkatan pada penduduk yang berusaha sendiri. Pada tahun 2017, penduduk Kendal yang berusaha sendiri sebesar 16,48 persen kemudian meningkat menjadi 18,65 persen di tahun 2018. Sementara untuk penduduk yang berusaha dibantu pekerja tak dibayar terlihat menurun dari 17,24 persen di 2017 menjadi 11,38 persen di 2018. Menurunnya persentase penduduk yang berusaha sendiri dan buruh/karyawan pada tahun 2018 memberikan gambaran yang lebih baik, karena keadaan tersebut dibarengi dengan peningkatan persentase penduduk yang berusaha dibantu pekerja tak dibayar maupun pekerja tetap. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa terjadi peningkatan kualitas pekerjaan di Jawa Tengah, dimana sebagian penduduk yang semula menjadi buruh/karyawan pada tahun 2018 sudah mampu menjadi wirausaha, baik dibantu pekerja tetap maupun pekerja tidak dibayar. Begitu pula dengan penduduk yang semula berusaha sendiri, kini sudah mampu menambah tenaga kerja, baik pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Di sisi lain, pada tahun 2018 persentase pekerja keluarga/tidak dibayar meningkat. Hal ini merupakan sinyal negatif, karena penduduk pada kelompok ini masih menjadi beban tanggungan bagi keluarga atau orang lain.





# **BAB 5 TARAF DAN POLA KONSUMSI**



**P**ola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga dikatakan sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.



## PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan relative lebih tinggi. Peningkatan pengeluaran bukan makanan seiring dengan peningkatan pendapatan. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsinya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan tahun 2018 dan 2019. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk per bulan sebesar 10,21 persen yaitu meningkat dari 936.143 rupiah pada tahun 2018 menjadi 1.031.742 rupiah pada tahun 2019. Peningkatan pengeluaran tersebut terjadi baik pada pengeluaran makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran makanan meningkat 6,40 persen dan pengeluaran bukan makanan meningkat 14,04 persen. Namun apabila dilihat komposisi pengeluarannya, ter-

*Lebih dari setengah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Kendal digunakan untuk konsumsi makanan*

jadi perubahan proporsi pengeluaran makanan dan bukan makanan sebesar 1,73 poin. Terdapat suatu teori yang diungkapkan oleh Ernest Engel (1857) bahwa jika selera masyarakat tidak berubah maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Atau dengan kata lain, berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Kendal sudah semakin baik.

**Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Kendal, 2017– 2018**

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Makanan</b>	<b>435.754</b>	<b>469.441</b>	<b>52,35</b>	<b>50,15</b>
<b>Bukan Makanan</b>	<b>396.706</b>	<b>466.702</b>	<b>47,65</b>	<b>49,85</b>
- Perumahan	157.093	201.541	18,87	21,53
- Barang dan Jasa	113.376	130.968	13,62	13,99
- Pakaian	25.087	30.076	3,01	3,21
- Barang Tahan Lama	62.492	63.295	7,51	6,76
- Lainnya	38.685	40.822	4,64	4,36
<b>Jumlah</b>	<b>936.143</b>	<b>936.143</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

Secara umum dengan menggunakan kriteria Bank Dunia maka Kabupaten Kendal termasuk dalam wilayah yang memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang rendah, hal ini terlihat dari pendapatan yang dikuasai oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah menguasai 19,90 persen dari total pendapatan penduduk Kabupaten Kendal (diatas 17 persen). Meskipun demikian, pada kenyataannya kelompok penduduk terkayalah yang paling banyak menikmati pembangunan di Kabupaten Kendal, yaitu sebesar 40,75 persen untuk golongan teratas, sedangkan untuk kalangan menengah sebesar 39,35 persen.

Meningkatnya persentase pengeluaran pada 40 persen penduduk berpengeluaran terendah dan menurunnya persentase pengeluaran pada 20 persen penduduk berpengeluaran tertinggi mengindikasikan ketimpangan pendapatan makin rendah atau pemerataan pendapatan semakin baik. Hal ini mengandung

**Tabel 5.2 Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Kendal Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, 2014-2018**

Karakteristik	Kriteria Bank Dunia		
	40 Persen Rendah	40 Persen Menengah	20 Persen Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	19,71	36,11	44,18
2015	20,24	34,13	45,63
2016	26,25	33,00	40,75
2017	19,41	37,45	43,14
2018	19,90	39,35	40,75

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

pengertian bahwa dampak kemajuan pembangunan lebih dirasakan oleh penerima pendapatan kelompok sedang dan tinggi. Idealnya, kelompok penerima pendapatan sedang dan tinggi mampu mentransfer kepada kelompok penerima pendapatan rendah sehingga akan lebih merata.



Tingkat kecukupan gizi yang memenuhi konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

*Konsumsi kalori per hari penduduk Kabupaten Kendal di Tahun 2018 masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan*

**Tabel 5.3 Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Perhari Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018**

	Tahun	Total
	(1)	(2)
<b>Energi (kkal)</b>		
	2017	2.055,48
	2018	2.046,49
<b>Protein (gram)</b>		
	2017	59,35
	2018	60,76

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

Pada tahun 2018, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Kendal sebesar 2.046,49 kkal atau turun sebesar 9 kkal dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian konsumsi kalori per hari penduduk Kabupaten Kendal di Tahun 2018 masih belum juga memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Kabupaten Kendal juga mengalami peningkatan, yaitu dari 59,35 gram pada tahun 2017 menjadi 60,76 gram pada tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan terpenuhinya kecukupan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu 57 gram perhari.



# BAB 6 PERUMAHAN

<https://kendalkab.bpps.go.id>



**R**umah dan fasilitasnya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.



## **KUALITAS RUMAH TINGGAL**

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Rumah tinggal yang dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2018, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2018, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 87,85 persen atau mengalami peningkatan sebesar hampir 3 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 85,01 persen.

**Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Kendal Tahun 2017 - 2018**

Indikator Kualitas Perumahan	Total	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Lantai bukan tanah (%)	85,01	87,85
Atap beton, genteng, seng dan asbes (%)	99,91	99,89
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	95,15	96,15

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Berdasarkan hasil Susenas, setiap tahunnya lebih dari 99 persen rumah tinggal sudah mempunyai atap beton, genteng, seng dan asbes. Untuk bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas berupa tembok dan kayu setiap tahunnya mengalami peningkatan, tahun 2018 ini mengalami kenaikan 1 persen dari tahun 2017.

Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai perkapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total penduduk. Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 meter persegi, sedangkan menurut World Health Organization (WHO) serta American Public Health Association (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi (BPS, 2015).



## FASILITAS RUMAH TINGGAL

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Fasilitas perumahan yang penting lainnya adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, sebanyak 99,92 persen rumah tangga telah menikmati fasilitas penerangan listrik, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 (99,88 persen). Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pada tahun 2018, rumah tangga yang menggunakan listrik di perkotaan sebanyak 99,94 persen, sementara di daerah perdesaan sebanyak 99,90 persen (Tabel 6.3).

**Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018 (Persentase)**

Fasilitas Perumahan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Penerangan Listrik	99,94	100,00
Air minum kemasan/leding	48,46	25,72
Jamban sendiri dengan septik tank	84,29	80,43

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

Pada tahun 2018, rumah tangga di Kabupaten Kendal yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum dan masak mencapai 25,72 persen turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 48,46 persen. Selama tahun 2017-2018 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan septik tank juga menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.



## STATUS KEPEMILIKAN RUMAH TINGGAL

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah

rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2018, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 90,62 persen, sisanya 9,38 persen adalah bukan milik sendiri. Persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri meningkat hampir 1 persen dibanding tahun sebelumnya. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/sewa, rumah tangga yang tinggal di rumah bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya.

**Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018 (Persentase)**

Status Rumah Tinggal	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	89,64	90,62
Bukan Milik Sendiri	10,36	9,38

Sumber: Diolah dari hasil Susenas



# **BAB 7 KEMISKINAN**

<https://kemdiknas.go.id>



Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Kendal.

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya.



## PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN

Selama periode 2015-2018, penduduk miskin di Kabupaten Kendal menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Hal ini tentunya merupakan capaian yang baik yang merupakan keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kendal. Untuk menganalisis kemiskinan lebih lanjut, perlu dilihat besaran lain seperti garis kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

**Tabel 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal Tahun 2015-2018 (Persentase)**

Tahun	Jumlah (Ribu Orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
2015	109,27	11,62
2016	107,81	11,37
2017	106,07	11,10
2018	94,70	9,84

Sumber: Diolah dari hasil Susenas



## GARIS KEMISKINAN (GK), INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1), INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Garis Kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2015 hingga 2018. Pada tahun 2016, garis kemiskinan di Kabupaten Kendal sebesar Rp 323.078 kemudian meningkat menjadi Rp 335.497 pada tahun 2017 hingga kemudian menjadi Rp 353.127 pada tahun 2018.

*Selama tahun 2015 hingga 2018 indikator-indikator kemiskinan menunjukkan trend membaik*

**Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kendal, Tahun 2015-2018**

Indikator	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Garis Kemiskinan	301.449	323.078	335.497	353.127
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,17	2,13	1,69	1,85
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,57	0,62	0,39	0,47

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kendal selama periode 2015 hingga 2018 cukup menggembirakan, walaupun kembali naik pada tahun 2018.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Tak berbeda jauh

dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir dari tahun 2015-2017, kemudian naik pada 2018.

Meskipun beberapa indikator kemiskinan menunjukkan hasil yang mengembirakan, namun masih perlu upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih optimal sehingga dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam dan terlalu parah”. Terlebih dikarenakan target kemiskinan sesuai RPJMD belum dapat dipenuhi.

Selain indikator garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga dan kondisi perumahan. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.



## KARAKTERISTIK PENDIDIKAN

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, idealnya akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan memperkecil peluang berada pada kondisi miskin.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi maka besar kemungkinan dapat memutus rantai kemiskinan dan keluar dari kemiskinannya di masa depan.

Menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal, antara lain dipengaruhi oleh membaiknya karakteristik pendidikan penduduk miskin itu

*Penurunan persentase penduduk miskin yang berpendidikan rendah merupakan pertanda membaiknya kualitas pendidikan penduduk miskin*

sendiri. Persentase penduduk miskin yang tidak tamat SD dari tahun 2015 hingga 2018 cenderung menurun dari sebesar 41,98 persen pada tahun 2015 menjadi 35,88 persen pada tahun 2018.

Sementara untuk penduduk miskin yang tamat SD/SLTP dan juga tamat SLTA ke atas selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat menjadi 56,22 persen dan 11,97 persen pada tahun 2018. Dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan penduduk miskin, diharapkan dapat menjadi modal yang kuat di masa depan untuk penanggulangan kemiskinan.

Persentase Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin untuk usia 15-24 tahun relatif stabil angkanya hampir mencapai 100 persen selama tahun 2015-2018. Artinya penduduk miskin pada usia muda-remaja (15-24 tahun) hampir semua sudah bisa membaca dan menulis. Sementara untuk kelompok usia 15-55 tahun, persentase AMH lebih rendah dibandingkan kelompok usia muda-remaja namun capaiannya cenderung meningkat. Pada tahun 2015 tercatat 96,87 persen pada tahun 2015, empat tahun kemudian menjadi 97,17 persen pada tahun 2018. Besaran angka tersebut menunjukkan masih ada sekitar 3 persen pada kelompok usia 15-55 tahun yang tidak dapat membaca dan menulis.

Angka partisipasi sekolah (APS) menunjukkan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, angka partisipasi sekolah untuk kategori 7-12 tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 hingga 2018 nilai APS kategori usia 7-12 tahun berkisar pada angka 96 persen hingga 100 persen. Sedikit berbeda dengan kategori 7-12 tahun, APS untuk kategori usia 13-15 mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Penurunan ini menunjukkan bahwa beberapa lulusan SD pada rumah tangga miskin pada saat itu tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP.

**Tabel 7.3 Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin Kabupaten Kendal, 2015 – 2018**

Karakteristik Pendidikan	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1. Pendidikan Tertinggi yg Ditamatkan</b>				
• Tidak Tamat SD	41,98	41,95	35,05	35,88
• Tamat SD/SLTP	52,79	48,05	53,25	52,84
• Tamat SLTA atau lebih	5,23	9,99	11,70	11,28
<b>2. Angka Melek Huruf (AMH)</b>				
• 15-24 Tahun	100,00	98,57	100,00	100,00
• 15-55 Tahun	93,86	98,16	96,52	95,45
<b>3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>				
• 7-12 Tahun	100,00	96,51	100,00	100,00
• 13-15 Tahun	86,79	86,93	52,12	81,30

Sumber: Badan Pusat Statistik



## KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN

Indikator kedua setelah pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin yaitu ketenagakerjaan. Mampu tidaknya suatu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dapat dilihat dari karakteristik pekerjaan rumah tangga itu sendiri. Menurunnya jumlah maupun persentase penduduk miskin selama tahun 2015 hingga 2018 searah dengan karakteristik ketenagakerjaan penduduk miskin itu sendiri. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja cenderung menurun selama tahun 2015-2018 dari 57,88 persen pada tahun 2015 menjadi 54 persen pada tahun 2018. Meskipun persentase penduduk miskin yang bekerja cenderung menurun namun secara keseluruhan persentase penduduk miskin juga menurun, hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas penduduk miskin makin meningkat.

Jika diamati penduduk miskin yang bekerja menurut lapangan pekerjaan terlihat persentase penduduk miskin di Sektor Pertanian cenderung semakin menurun. Lain halnya yang bekerja di luar Sektor Pertanian persentasenya masih berfluktuasi. Realita ini menunjukkan dua kemungkinan, penduduk miskin bekerja yang mampu keluar dari garis kemiskinan lebih banyak dari sektor pertanian atau beralihnya pekerjaan penduduk miskin dari pertanian ke non pertanian makin besar.

**Tabel 7.4 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Kabupaten Kendal, 2015 – 2018 (Persentase)**

Rincian	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Bekerja	42,12	37,09	44,90	46,00
Bekerja	57,88	62,91	55,10	54,00
Bekerja di Sektor Pertanian	24,31	34,24	26,79	20,37
Bekerja bukan di Sektor Pertanian	33,57	28,67	28,31	33,63

Sumber: Diolah dari hasil Susenas

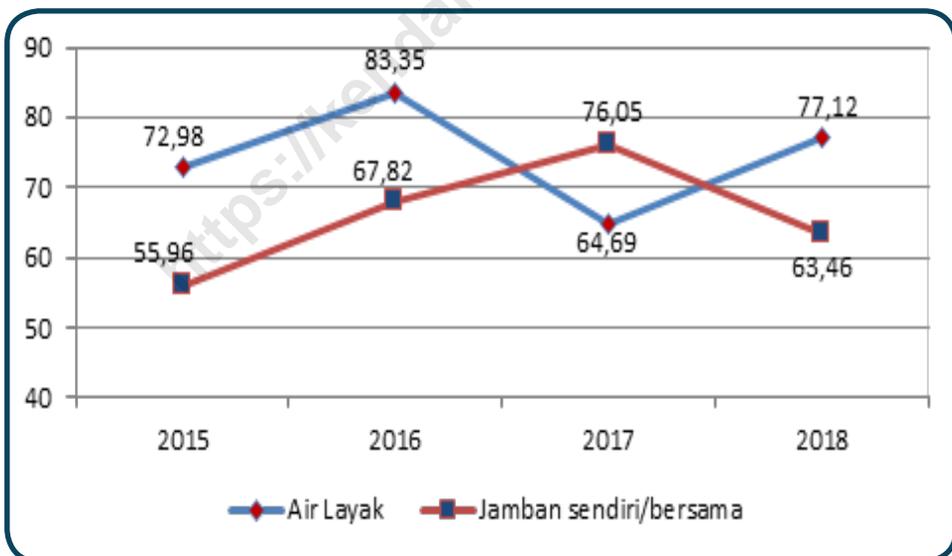


## KARAKTERISTIK PERUMAHAN

Karakteristik perumahan rumah tangga miskin digambarkan oleh persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih/layak dan persentase penggunaan jamban. Air bersih merupakan barang mewah bagi rumah tangga miskin khususnya yang tinggal di perkotaan.

Selama tahun 2015 hingga 2018, persentase rumah tangga miskin yang mendapatkan akses air bersih masih fluktuatif dengan kecenderungan meningkat meskipun di tahun 2017 mengalami penurunan yakni dari 83,35 persen di tahun 2016 menjadi 64,69 persen pada tahun 2017. Namun, angka ini meningkat di tahun 2018 menjadi 77,12 persen, sehingga jika dilihat capaiannya pada tahun 2018, masih ada sekitar 23 persen rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses air bersih.

**Gambar 7.1 Karakteristik Perumahan pada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kendal, 2015-2018 (Persentase)**



Sumber: Diolah dari hasil Susenas

Seperti halnya penggunaan air bersih, sanitasi yang layak juga merupakan barang yang mewah bagi beberapa kalangan masyarakat. Padahal kebutuhan akan sanitasi tidak bisa dianggap remeh karena berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Pada tiga tahun terakhir antara 2015-2017, persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama selalu mengalami peningkatan, namun kemudian mengalami penurunan di tahun 2018. Kondisi terakhir di tahun 2018, masyarakat miskin yang menggunakan jamban sendiri/

bersama sebesar 63,46 persen. Dalam laporannya, PBB menyatakan bahwa 80 persen penyakit di negara berkembang adalah dampak dari cemaran air oleh tinja dan bahan cemaran lainnya. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat berupaya untuk memperbaiki sanitasi masyarakat sehingga mengurangi resiko pencemaran lingkungan.

<https://kendalkab.bps.go.id>





**K**abupaten Kendal sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak berdampingan dengan ibukota Provinsi memiliki luas 1.001,73 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk di tahun 2019 sebanyak 971.001 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.69 setahun serta rasio menurut jenis kelamin sebesar 102.76, artinya jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kendal tahun 2019 sebesar 969 jiwa/km<sup>2</sup>, naik dibanding tahun 2018, yang sebanyak 963 jiwa/km<sup>2</sup>. Pesebaran penduduk di Kabupaten Kendal cukup merata tersebar di 20 Kecamatan, dengan jumlah penduduk tertinggi berada di wilayah kecamatan Kendal sebanyak 2.164 jiwa, disusul Weleri sebanyak 1.927 jiwa dan Cepiring sebanyak 1.640 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah di wilayah kecamatan Singorojo, sebanyak 426 jiwa.

Indikator produktivitas penduduk ditunjukkan oleh angka dependency ratio, yang merupakan angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Di Kabupaten Kendal selama periode 2015-2019 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan, meskipun lambat, yaitu berada pada posisi 45.52 persen, artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 46 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan yang cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi sumber daya manusia guna mendorong produksi, yaitu saat terjadi fenomena Bonus Demografi.

Indikator kesehatan dan gizi dapat dilihat pada angka umur panjang dan hidup sehat. Hal ini terlihat pada angka kesakitan (morbiditas) yaitu menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2018 mencapai 16,99 persen, menurun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 19,40 persen. Artinya, derajat kesehatan masyarakat Kendal menunjukkan peningkatan karena lebih sedikit penduduk yang mengalami sakit di tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dilihat berdasarkan golongan pengeluaran, angka kesakitan penduduk dengan golongan 40 persen menengah (18,25 persen) paling tinggi dibandingkan angka kesakitan penduduk 40 persen terendah (15,80 persen) dan angka kesakitan penduduk 20 persen teratas (16,86 persen). Sementara persentase penduduk kabupaten Kendal yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir pada tahun 2018 sebesar 38,56 persen, dengan komposisi 36,89 persen penduduk laki-laki dan 40,27 persen penduduk perempuan. Artinya, penduduk perempuan di Kendal lebih banyak yang mengalami keluhan kesehatan dibanding penduduk laki-laki. Selain itu kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus disosialisasikan melalui program GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat) dengan harapan dapat semakin mengurangi angka kesakitan di masyarakat.

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Peningkatan kualitas SDM harus tetap dilakukan, dengan harapan SDM yang berkualitas mampu berpengaruh positif terhadap pembangunan. Selama lima tahun terakhir, kualitas pendidikan di Kendal yang diukur berdasarkan indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang produktif.

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kendal tumbuh rata-rata 1,74 persen per tahun selama periode 2012 hingga 2018. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Kendal yang lebih baik. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kendal tahun 2018 sebesar 7,05 tahun dari semula 6,85 tahun, atau tumbuh 2,91 persen. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Kendal menyelesaikan pendidikan formal hingga kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan pembenahan bidang pendidikan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi kendala yang telah dihadapi guna meningkatkan kesempatan mengenyam pendidikan hingga minimal 9 tahun.

Selama periode 2012 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kendal telah meningkat sebesar 1,23 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,69 tahun. Selama periode 2012 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,73 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2018, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kendal telah mencapai 12,70 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.

Indikator kesejahteraan lainnya yang cukup strategis adalah ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, terjadi pergeseran persentase lapangan usaha utama dari pertanian menjadi industri. Pergeseran ini didorong oleh semakin sempitnya lahan pertanian di Kendal akibat tergerus industri, pemukiman, dan pembangunan jalan tol. Selain itu juga akibat dari ketertarikan penduduk pada lapangan usaha ini mulai menurun yang mengakibatkan berkurangnya produktifitas hasil pertanian. Menurunnya ketertarikan pada lapangan usaha pertanian disebabkan oleh banyak hal antara lain tingkat pendidikan yang semakin tinggi yang mendorong angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan upah/keuntungan lebih tinggi yang saat ini banyak ditawarkan oleh kategori industri.

Rumah tangga dikatakan sejahtera jika persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan untuk non makanan. Pergeseran lapangan usaha utama penduduk Kabupaten Kendal berdampak pada pola pengeluaran rumah tangga.

Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap

# Kesimpulan

barang bukan makanan relative lebih tinggi. Peningkatan pengeluaran bukan makanan seiring dengan peningkatan pendapatan. Namun begitu, seiring dengan membaiknya pendapatan rumah tangga, konsumsi kalori dan protein meningkat dari tahun ke tahun.

Membaiknya pendapatan penduduk berdampak pula pada membaiknya kualitas perumahan yang dapat dilihat dari meningkatnya persentase lantai bukan tanah, penggunaan atap beton maupun genteng, penggunaan dinding tembok dan kayu, penggunaan air bersih, penggunaan listrik, penggunaan jamban sendiri, dll. Selain berdasarkan kualitas perumahan, kepemilikan rumah milik sendiri pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan upaya pemerintah membangun rumah sederhana atau program pembangunan rumah baru atau layak huni, ditambah dengan dukungan perbankan yang semakin menekan bunga KPR.

Meningkatnya presentase konsumsi non makanan, membaiknya kualitas pendidikan dan perumahan dapat menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan penduduk dan berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Kendal. Akan tetapi yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya indeks kedalaman serta keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan bahwa masih terdapat penduduk miskin dengan pengeluaran yang jauh dibawah garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan menggambarkan masih ada ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin itu sendiri. Meskipun begitu, berdasarkan karakteristik pendidikan dan kualitas perumahan, penduduk miskin terus membaik dari tahun ke tahun.



# Daftar Pustaka

- BPS. 2015, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten\_ Kota Tahun 2015.  
Jakarta: BPS
- BPS. 2016, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten\_ Kota Tahun 2016.  
Jakarta: BPS
- BPS. 2017, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten\_ Kota Tahun 2017.  
Jakarta: BPS
- BPS. 2018, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten\_ Kota Tahun 2018.  
Jakarta: BPS
- BPS Kabupaten Kendal. 2017, Statistik Kesejahteraan Kabupaten Kendal 2017.  
Kendal: BPS Kabupaten Kendal
- BPS Kabupaten Kendal. 2018, Statistik Kesejahteraan Kabupaten Kendal 2018.  
Kendal: BPS Kabupaten Kendal
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2018. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2018. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- Kaula Karima, Endang L. Achadi. 2012. Status Gizi Ibu dan Berat Badan Lahir Bayi. Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol.7 No 3.: 111-112

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KENDAL**

Jl. Pramuka (Kompleks Perkantoran) Kendal 51351  
Telp. (0294) 381461, Fax.(0294) 383461  
Email : [bps3324@bps.go.id](mailto:bps3324@bps.go.id)  
Homepage : <http://kendalkab.bps.go.id>